

p-ISSN 1978-6506
e-ISSN 2579-4868

Terakreditasi LIPI
No. 706/AU/P2MI-LIPI/10/2015

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 11 No. 2 Agustus 2018 Hal. 131 - 265

“IN CAUSA POSITUM”



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Danang Wijayanto, Ak., M.Si.
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)
2. Drs. Hamka Kapopang (Komunikasi)

Penyunting:

1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata)

Mitra Bestari:

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis)
6. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)
7. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan)

8. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (Hukum Agraria dan Hukum Adat)
9. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu Politik)
10. Myrna Asnawati Safitri, S.H., M.Si., Ph.D. (Hukum Lingkungan dan Agraria)

Sekretariat:

1. Agus Susanto, S.Sos., M.Si.
2. Yuni Yulianita, S.S.
3. Noercholysh, S.H.
4. Wirawan Negoro, A.Md.
5. Didik Prayitno, A.Md.
6. Eka Desmi Hayati, A.Md.

Desain Grafis
dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

E-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

“IN CAUSA POSITUM”

Pada edisi Agustus 2018 ini Jurnal Yudisial mengangkat tema “In Causa Positum”, yang diartikan “hukum terciptakan dari faktanya”, atau hukum ada dalam kenyataannya. Tema ini merefleksikan aspek fundamental dari hukum itu, yaitu mencoba menjawab apakah hukum itu? Apa sesungguhnya hakikat hukum itu. Hukum tidak semata-mata asas dan kaidah (norma) dalam peraturan perundang-undangan, bukan hanya sekedar wadah (struktur) yang statis, melainkan proses yang sangat dinamis, yaitu bagaimana mewujudkan asas dan kaidah (norma) dalam kenyataannya. *In causa positum*, pada hakikatnya ingin menjelaskan bagaimana hukum lahir melalui proses penafsiran, ketika asas dan kaidah bersentuhan dengan realitas.

Beberapa artikel yang hadir pada edisi Agustus ini, mencerminkan bagaimana dinamika proses sebagaimana dijelaskan di atas, misalnya kajian terhadap Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 yang dipandang telah meniadakan prinsip dasar tentang *materiele wederrechtelijk*, yaitu meniadakan eksistensi hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai sumber hukum. Kajian berikutnya membahas Putusan Nomor 75/PUU-XIII/2015, penulisnya mengangkat tema tentang frasa “berkas penyelidikan yang kurang lengkap”, dalam perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat, yang bersifat multi-interpretasi dan dapat menimbulkan persoalan bagi pencari keadilan. Terlepas dari perdebatan itu, penulisnya memandang bahwa putusan tersebut dianggap merupakan tonggak pemahaman untuk memperoleh kebenaran materiil.

Putusan Nomor 2399 K/PID.SUS/2010, merupakan kajian terhadap kasus tindak pidana korupsi di mana hakim menerobos ketentuan pidana minimum. Tulisan ini membahas mengenai *infra petita* putusan dalam tindak pidana korupsi, yaitu bagaimana nilai keadilan seharusnya menjadi pertimbangan pengambilan keputusan. Artikel selanjutnya mengkaji Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB, penulisnya mengangkat tema mengenai *illegal fishing* yang akibat kerugiannya tidak sebanding dengan pidana denda yang diberikan. Kajian terhadap Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG, merupakan artikel berikutnya yang membedah prinsip *restorative justice*. Putusan tersebut oleh penulisnya dipandang telah mencerminkan semangat *restorative justice* yang diterapkan pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum dan putusan itu juga telah memastikan adanya pemenuhan hak-hak anak.

Artikel selanjutnya membahas penggunaan hermeneutika untuk membedah Putusan Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TNG, penulisnya berkesimpulan, bahwa majelis hakim (dalam putusan tersebut) telah keliru menafsirkan konsep pertanggungjawaban kepada daerah. Penulisnya menyajikan polemik tasir tentang lapangan hukum, yaitu wanprestasi pada satu sisi dan tanggung jawab administratif pada sisi lainnya. Artikel terakhir mengkaji tentang Putusan Nomor 329 K/AG/2014 tentang status anak di

luar kawin. Penulisnya berpandangan, bahwa setelah ditelaah melalui konsep hukum progresif, putusan tersebut lebih mengutamakan aspek yuridis formal semata, aspek sosiologis dan filosofis cenderung diabaikan. Menurut penulisnya seharusnya putusan tersebut mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

In causa positum, hukum selalu ada dalam kenyatannya, selamat membaca dengan kritis.

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

KONSTITUSIONALITAS <i>MATERIELE WEDERRECHTELIJK</i> DALAM KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	131 - 150
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006	
Ade Adhari	
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta	
<i>INFRA PETITA</i> PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENEROBOS KETENTUAN PEMIDANAAN MINIMUM	151 - 170
Kajian Putusan Nomor 2399 K/PID.SUS/2010	
Anshar & Suwito	
Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate	
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Biak	
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM <i>ILLEGAL FISHING</i> DI INDONESIA	171 - 192
Kajian Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB	
Oksimana Darmawan	
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta	
KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN PIDANA ANAK	193 - 208
Kajian Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG	
Hesti Septianita	
Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung	
PEMBEBANAN TANGGUNG JAWAB PERDATA KEPADA KEPALA DAERAH AKIBAT WANPRESTASI OLEH KEPALA DINAS	209 - 225
Kajian Putusan Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TNG	
Bachtiar & Tono Sumarna	
Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan	
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Tangerang Selatan	
INTERPRETASI 'KURANG LENGKAP' BERKAS PENYELIDIKAN DALAM PERKARA DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT	227 - 241

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XIII/2015
Hwian Christianto
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

TENTANG ANAK DI LUAR KAWIN 243 - 265

Kajian Putusan Nomor 329 K/AG/2014
Nurhadi
Mahkamah Syar'iyah Sabang, Sabang

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 11 No. 2 Agustus 2018

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 347.192; 343.352

Adhari A (Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta)

Konstitusionalitas *Materiele Wederrechtelijk* dalam Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Jurnal Yudisial 2018 11(2), 131 - 150

Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan *materiele wederrechtelijk* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan tidak berlaku mengikat. Penelitian ini berupaya memahami apakah tepat atau tidak pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penelitian doktrinal, norma hukum serta asas yang melandasi lahirnya putusan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaktepatan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah keliru dalam usahanya memvalidasi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan menguji berdasarkan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Padahal prinsipnya pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi berorientasi pada asas legalitas yang hanya mengutamakan *rechtssicherheit* dan mengesampingkan keberadaan *gerechtigheit* dan *zweckmässigkeit*. Lebih dari itu, tidak diakuinya *materiele wederrechtelijk* telah meniadakan eksistensi hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum. Hal ini bertentangan dengan mandat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dengan demikian *materiele wederrechtelijk* tidak bertentangan dengan konstitusi.

(Ade Adhari)

Kata kunci: *materiele wederrechtelijk*, korupsi, konstitusionalitas.

UDC 343.352

Anshar & Suwito (Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Biak)

Infra Petita Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Menerobos Ketentuan Pidanaan Minimum

Kajian Putusan Nomor 2399 K/PID.SUS/2010

Jurnal Yudisial 2018 11(2), 151 - 170

Penanganan perkara tindak pidana korupsi menganut sistem pidana minimum bagi pelaku yang diputus bersalah oleh pengadilan. Istilah ketentuan pidana minimum khusus secara normatif diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tataran praktiknya terdapat fenomena adanya putusan pengadilan yang menerobos sistem pidana minimum yang dianut tersebut. Salah satu contoh putusan pengadilan yang ditelaah dalam tulisan ini adalah Putusan Nomor 2399 K/PID.SUS/2010. Permasalahan yang timbul adalah apa saja yang menjadi landasan *infra petita* hakim dalam menjatuhkan putusan yang menerobos ketentuan pidana minimum dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulis berkesimpulan bahwa putusan pengadilan

tindak pidana korupsi yang menerobos ketentuan pembedaan minimum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya diperbolehkan. Sepanjang putusan hakim yang <i>infra petita</i> tersebut memiliki esensi <i>ratio legis</i> yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, atas dasar alasan pertimbangan nilai keadilan dan pertimbangan <i>judex factie</i> sebagaimana pada perkara <i>a quo</i>. (Anshar & Suwito) Kata kunci: putusan, korupsi, pembedaan minimum	diketahui bahwa Indonesia masih menganut sistem pertanggungjawaban yang kedua, yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Hal ini tampak tidak sebanding dengan efek dari kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu diadakan revisi terhadap undang-undang tersebut, sehingga korporasi sebagai pelaku kejahatan yang sesungguhnya dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi sanksi pidana. (Oksimana Darmawan) Kata kunci: hukum laut dan perikanan, pertanggungjawaban pidana korporasi, <i>illegal fishing</i>.
UDC 639.2.081(910) Darmawan O (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia Kajian Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(2), 171 - 192 <i>Illegal fishing</i> adalah kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional. Mengingat kerugian yang ditimbulkannya sangat besar dan sebagian besar pelakunya adalah korporasi, maka perlu dikaji bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ini. Tulisan ini mengkaji bagaimana Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB terhadap kapal asing yang melakukan praktik <i>illegal fishing</i> di perairan Indonesia. Metode analisis yang diterapkan untuk menjawab permasalahan adalah dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Pelaku tindak pidana <i>illegal fishing</i> di wilayah perairan Indonesia secara umum adalah setiap orang yang diartikan perseorangan atau korporasi. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi disebutkan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,	UDC 343.224.1 Septianita H (Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung) Keadilan Restoratif dalam Putusan Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(2), 193 - 208 Tulisan ini merupakan sebuah analisis terhadap Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG, yang mengkaji sudah tepat atau tidak putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan tingkat banding tersebut dengan konsep <i>restorative justice</i>. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang menggambarkan sekaligus menganalisis pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan yang diambil oleh hakim pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama merupakan pertimbangan yang tepat di mana hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip <i>restorative justice</i>. Hakim tidak hanya mempertimbangkan upaya pemberian efek jera tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan memastikan pemenuhan hak atas pendidikan dan

menghindarkan anak dari risiko pengaruh buruk yang dapat berujung pada berulangnya tindak pidana, karena dalam isu anak yang berkonflik dengan hukum, pendidikan bagi semua anak tanpa memandang asal, ras, gender, kecacatan atau kemampuan dan layanan kesehatan serta advokasi harus diperhatikan. Sejumlah anak tidak sempat mengenyam pendidikan yang lengkap karena situasi penjara yang tidak memungkinkan untuk memberikan pendidikan bagi warga binaannya. (Hesti Septianita) Kata kunci: pidana anak, pembinaan, <i>restorative justice</i>.	sesuai dengan ajaran hukum administrasi negara, dan ajaran hukum perdata. Untuk menjawab isu hukum tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bersandar pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah keliru dalam menafsirkan konsep pertanggungjawaban kepala daerah. Menurut ajaran hukum administrasi negara, walikota selaku kepala daerah tidak dapat dimintai tanggung jawab secara perdata akibat wanprestasi yang dilakukan kepala dinas. Demikian pula dari perspektif Pasal 1340 KUHPperdata, walikota bukanlah merupakan pihak dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh kepala dinas, sehingga tidak dapat dibebani tanggung jawab secara keperdataan. (Bachtiar & Tono Sumarna) Kata kunci: tanggung jawab perdata, kepala daerah, wanprestasi.
UDC 353.2 Bachtiar & Sumarna T (Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Bagian Hukum Pemerintah Kota Tangerang Selatan) Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas Kajian Putusan Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TNG <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(2), 209 - 225 Wanprestasi dalam perjanjian konstruksi kerap ditemui dalam praktik, baik yang dilakukan oleh pemberi pekerjaan, maupun pihak pelaksana pekerjaan. Konsekuensinya, pihak yang melakukan wanprestasi dibebankan memulihkan kerugian yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Hal demikian tercermin dalam Putusan Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TGR, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan selaku pihak pemberi pekerjaan proyek terbukti melakukan wanprestasi. Menarik untuk dicermati, majelis hakim dalam putusannya justru membebaskan Walikota Tangerang Selatan untuk bertanggung jawab secara keperdataan. Isu hukum yang hendak dijawab dalam tulisan ini, terkait apakah penafsiran hakim dalam Putusan Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TNG tentang pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi yang dilakukan oleh kepala dinas telah	UDC 342.7 Christianto H (Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya) Interpretasi ‘Berkas Kurang Lengkap’ dalam Penyelidikan Perkara Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XIII/2015 <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(2), 227 - 241 Putusan Nomor 75/PUU-XIII/2015 atas permohonan pengujian Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, memiliki aspek menarik terkait kepastian hukum dan keadilan. Pemohon menilai keberadaan istilah ‘berkas kurang lengkap’ dalam ketentuan <i>a quo</i> memberikan ketidakadilan karena tidak memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, penyidik, dalam hal ini Jaksa Agung justru menganggap keberadaan rumusan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan yang dibutuhkan oleh pencari keadilan maupun masyarakat. Penelitian menggunakan

metode penelitian studi kasus yang mendasarkan dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan hukum primer, dibandingkan dengan bahan hukum sekunder berupa teori hukum pidana dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 75/PUU-XIII/2015 memberikan pertimbangan, bahwa pengaturan tersebut tetap konstitusional. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan bahwa keberadaan berkas penyelidikan yang ‘kurang lengkap’ dapat dimungkinkan. Hal tersebut dianggap sebagai kondisi praktis penegakan hukum yang menekankan kehati-hatian dan persamaan di hadapan hukum.

(Hwian Christianto)

Kata kunci: berkas perkara, asas hukum acara pidana, *constitutional rights*, putusan hakim.

UDC 347.993; 362.72

Nurhadi (Mahkamah Syar’iyah Sabang, Sabang)

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Kawin

Kajian Putusan Nomor 329 K/AG/2014

Jurnal Yudisial 2018 11(2), 243 - 265

Putusan Nomor 329 K/AG/2014 terkait kedudukan anak di luar kawin yang berinisial MIR. MIR tidak diakui oleh ayahnya. Ibunya yang berinisial AM mengajukan gugatan isbat nikah (pengesahan perkawinannya) yang dikumulasikan dengan pengesahan kedudukan anaknya berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menolak seluruh gugatan AM dengan pertimbangan pengadilan agama tidak berwenang mengesahkan perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahan kedudukan anak di luar kawin bukan kewenangan pengadilan agama. Dari beberapa permasalahan yang ditemui, penelitian ini mengulas tiga rumusan masalah. *Pertama*, apakah dalam Putusan Nomor 329 K/AG/2014 sudah tercermin aspek yuridis,

aspek sosiologis, dan aspek filosofis? *Kedua*, apakah pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 329 K/AG/2014 telah mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010? *Ketiga*, bagaimana kondisi petitum tentang anak di luar kawin apabila ditinjau menurut teori keadilan, teori perlindungan, teori kewenangan, teori hukum progresif, dan teori *mashlahah*? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut lebih mengutamakan aspek yuridis, sedangkan aspek sosiologis dan filosofis cenderung diabaikan. Putusan tersebut tidak mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori kewenangan, teori hukum progresif, dan teori *mashlahah*, petitum tentang anak di luar kawin dapat dikabulkan.

(Nurhadi)

Kata kunci: anak di luar kawin, anak biologis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Agung.

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 11 No. 2 Agustus 2018

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC 347.192; 343.352 Adhari A (Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta) Wederrechtelijk Materiele Constitutionality in Corruption Eradication Policies An Analysis of Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(2), 131 - 150 Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006 states unlawful criminal acts (materiele wederrechtelijk) in the Anti-Corruption Law is inconsistent with Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, and not binding. Doctrinal research, legal norms and principles underlying the birth of the court decision are used in answering whether the problem arising from the decision is justified. Based on the result of the research, there is an inaccuracy in the consideration of the Constitutional Court. The Constitutional Court has erred in its attempt to validate the Elucidation of Article 2 Paragraph (1) of Corruption Law by examining based on the legality principle contained in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code. Whereas in principle, what has been conducted by the Constitutional Court is a judicial review of the law against the 1945 Constitution. In addition, the Constitutional Court's decision is oriented on the principle of legality which only prioritizes legal certainty (Rechtssicherheit) and overrides justice (Gerechtigkeit) and utility (Zweckmässigkeit). Moreover, the unrecognized materiele wederrechtelijk has negated the existence of a living law in society as a source of law to declare unlawful acts. This is contrary to the mandate of Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and various prevailing laws and regulations. Thus, the material wederrechtelijk is not contradictory to the constitution.	(Ade Adhari) Keywords: materiele wederrechtelijk, corruption, constitutionality. UDC 343.352 Anshar & Suwito (Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Biak) Infra Petita in Anti-Corruption Court Decision that Breach the General Criminal Provisions An Analysis of Court Decision Number 2399 K/PID.SUS/2010 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(2), 151 - 170 In the handling of a corruption case, mandatory minimum penalty is adopted in the criminal justice system for the offender who was found guilty by the court. The term 'mandatory minimum penalty' is normatively regulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999, as amended to Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Eradication. In practice there is a phenomenon of a court decision breaching the adopted mandatory minimum penalty. One example of a court decision analyzed hereon is the Decision Number 2399 K/PID.SUS/2010. The arising problem is what the consideration of the judge is for infra petita in imposing decision which breached the mandatory minimum penalty provision in that corruption case. This research uses normative legal research method with legislation approach. It can be concluded that it is basically permissible in the corruption court's decision to breach the minimum penalty provisions as stipulated in the Corruption Eradication Law. Provided that the judge's decision of infra petita, is based on strong legislation ratio and can be accounted for, on the basis of justice value and
--	---

judex factie considerations as in the a quo case. (Anshar & Suwito) Keywords: court decision, corruption, minimum penalty.	UDC 343.224.1 Septianita H (Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung) Restorative Justice in Court Decision on Juvenile Crime
UDC 639.2.081(910) Darmawan O (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta) Corporate Criminal Liability of Illegal Fishing in Indonesia An Analysis of Decision Number 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(2), 171 - 192 Illegal fishing refers to activities which contravene a state's <i>fisheries</i> law and regulations, or international conventions. Considering that the losses incurred are so massive and most of the perpetrators are corporations, the corporate criminal liability for this crime should be appraised. This paper examines how the Ambon District Court Decision Number 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB responds to foreign vessels conducting illegal fishing in Indonesian waters. The problem was analyzed using qualitative juridical methods. The perpetrators of illegal fishing in Indonesian territorial waters in general are anyone as an individual or corporation. In corporate criminal liability, as stated in Article 101 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, Indonesia still adheres to the second system of liability, in which the corporation as the responsible decision maker and board. This seems to be out of proportion to the effects of the crimes committed. Therefore, it is necessary to revise the law, so that corporation as the perpetrator can actually be held accountable and become a legal subject to criminal sanctions. (Oksimana Darmawan) Keywords: marine and fisheries law, corporate criminal liability, illegal fishing.	An Analysis of Court Decision Number 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(2), 193 - 208 This is an analysis of Court Decision Number 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG, which examines whether the decision imposed by the appellate court judge using the restorative justice concept is appropriate. Research in the analysis use normative juridical method with analytical descriptive approach, which describes and analyzes considerations taken by judges in making decision. The consideration taken by the appellate court judge reinforcing the decision of the first-level court judges is the right consideration since the judge decides the case by taking heed to the principles of restorative justice. The judge does not only weigh on the effort to provide a deterrent effect, but also the best interests of children in conflict with the law by ensuring the fulfillment of the children's educational rights and prevent them from the risk of bad influences that may lead to the recurrence of crime. Because in the issue of children in conflict with the law, education for all children regardless of origin, race, gender, disability or ability and health services and advocacy should be taken into account. The children are not able to get an adequate education because of the incapacity of prison conditions to provide education to their inmates. (Hesti Septianita) Keywords: juvenile crime, educational treatment, restorative justice. UDC 353.2 Bachtiar & Sumarna T (Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Bagian Hukum Pemerintah Kota Tangerang Selatan)

The Imposition of Civil Liability to the Regional Head Due to Default by the Head of Office An Analysis of Court Decision Number 72/PDT.G/2014/PN.TNG (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(2), 209 - 225 Breach of contract in construction agreements is often found in practice, whether carried out by the employer, or the implementing party. As a consequence, the defaulting party is charged to recover losses arising from the implementation of the agreement. This was reflected in Court Decision Number 72/PDT.G/2014/PN.TGR, which is the Head of South Tangerang City Health Office, as the project employer, has been proven in breach of contract. It is interesting to note that the panel of judges in its decision actually charged the Mayor of South Tangerang with a contractual liability. The legal issue in this paper is whether the interpretation of judges in Court Decision Number 72/PDT.G/2014/PN.TNG concerning the imposition of civil liability to the regional head due to default committed by the head of office is in accordance with the teachings of the law of state administration and civil law. To answer these issues, the author uses normative legal research methods based on secondary data obtained through literature studies. The results of the analysis show that the panel of judges has erred in interpreting the concept of regional head accountability. According to the teachings of the state administration law, the mayor as the head of the region cannot be privately liable for the default committed by the head of office. Likewise, from the perspective of Article 1340 of the Civil Code, the mayor is not a party to the implementation of the agreement made by the head of office, therefore civil liability cannot be burdened to him. (Bachtiar & Tono Sumarna) Keywords: civil liability, regional head, default	Interpretation of 'Files Incomplete' in the Investigation Case of Allegation of Severe Infringements of Human Rights An Analysis of Constitutional Court Decision Number 75/PUU-XIII/2015 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(2), 227 - 241 Constitutional Court Decision Number 75/PUU-XIII/2015 on the request for a judicial review of Article 20 paragraph (3) of Law on Human Rights Court has an interesting aspect related to the rule of law and justice. The Petitioner considered that the term 'incomplete file' in the quo provision raises a sense of injustice because it cannot bring legal certainty. Instead, the investigator, in this case the Attorney General considers the formulation can actually provide legal certainty as well as sense of justice needed by the justice seekers and the community. This analysis uses case study research method based on the document of Constitutional Court Decision as the primary law material compared with secondary law material in the form of criminal law theory and human rights. The results of the analysis show that the Constitutional Court Decision Number 75/PUU-XIII/2015 considers that the arrangement is still constitutional. This distinction of understanding suggests that 'case file incomplete' may be possible. It is regarded as the practical conditions of law enforcement that emphasize prudence and equality before the law. (Hwian Christianto) Keywords: case file, principles of criminal procedure law, constitutional rights, judge's decision.
UDC 342.7 Christianto H (Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya)	UDC 347.993; 362.72 Nurhadi (Mahkamah Syar'iyah Sabang, Sabang) The Implementation of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on Extramarital Child An Analysis of Court Decision Number 329 K/AG/2014 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2018 11(2), 243 - 265

The Supreme Court Decision Number 329 K/AG/2014 concerns on the case of an out-of-wedlock status with the initials MIR who was disowned by her father. The mother of the child initials AM, filed a lawsuit related to itsbat marriage (marriage ratification) which was accumulated with the ratification of her child's status based on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The decision completely rejected the lawsuit considering that the Religious Court was not authorized to ratify a marriage that occurred after the enactment of Law Number 1 of 1974, and the request to legalize the status of an extramarital child was not the authority of the religious court. Of the several problems encountered, in this analysis three formulations of the problem were discussed. First, has the Decision Number 329 K/AG/2014 reflected the juridical, sociological, and philosophical aspects? Second, have these legal considerations of Decision Number 329 K/AG/2014 implemented the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010? Third, how is the condition of petitum related to extramarital children viewed from the theory of justice, protection theory, authority theory, progressive legal theory, and mashlahah theory? The method used in this research is descriptive-analysis. The results showed that the decision prioritize the juridical aspect. Meanwhile, the sociological and philosophical aspects tend to be neglected. The decision does not seem to implement the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Based on the theory of justice, legal protection, authority, progressive law and mashlahah, petitum regarding extramarital children can be granted.

(Nurhadi)

Keywords: extramarital children, biological child, Constitutional Court Decision, Supreme Court Decision.